



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JL. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : bpkpad@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.6.3/06.a/BPKPAD/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,




SUHANDRI, SE., M.M

NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.8.6.3/06.a/BPKPAD/2026
 TANGGAL : 19 Januari 2026
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
I. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	89	90	90	90	90	90
	2. Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100	100	100	100
II. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75,53	75,73	75,93	76,13	76,33	76,53
III. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	4. Indeks Kemadirian Fiskal	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Agar seluruh stakeholder Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran Tujuan:

Opini BPK

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Tujuan
 Definisi Operasional : Opini BPK yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas Laporan Keuangan Daerah yaitu WTP, WDP, Tidak Wajar dan Tanpa diberikan Opini.

Formulasi	:	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI
Sumber data	:	Laporan Keuangan Daerah Tahun sebelumnya
Penanggung jawab	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah

Indikator Sasaran Strategis ess II

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan ukuran untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. IPKD ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang diukur oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)
Formulasi	:	IPKD diukur berdasarkan 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ; 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyerapan Anggaran 5. Kondisi Keuangan Daerah; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD
Sumber data	:	Hasil Penilaian saat Pengentrian Pengentrian pada aplikasi ipkd-bskdn.kemendagri.go.id dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

4. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.
Formulasi	:	$1 - \frac{DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Realisasi Anggaran
Penanggung jawab	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

III. Penjelasan Indikator Kinerja Taktikal
PEJABAT : ESSELON III

SASARAN ESELON III		INDIKATOR	TARGET					
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		- Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah Inovasi	1	1	1	1	1	1
		- Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
2	Meningkatnya tata kelola anggaran	- Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	46,15	43	40	40	30	30
		- Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	29,44	30	35	35	40	40
		- Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)	12,6	12	12	10	10	10
		- Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	71	72	72	72	73	73
3	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	- Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%)	87	87	89	91	92	93
		- Persentase Penurunan SILPA (%)	42	40	36	32	30	29
		- Persentase kepemilikan NPWP (%)	15,417	16,825	18,232	19,639	21,047	22,454
		- Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,3	4,2	4,1	4	4	4
4	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	- Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100
		- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	7	6	6	5	5	4
		- Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	100	90	80	70	60	50

	SASARAN ESELON III	INDIKATOR	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Meningkatnya tata kelola aset daerah	- Persentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	6	6	6	6,52	6,52	6,52
		- Assets Manajement (%)	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	- Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,86 %	11,76%	12,74%	13,69%	14,73%	15,60%
		- Rasio PAD (%)	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10
6	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	- Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	85	90	95	100	100	100
7	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	- Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (%)	80	85	90	95	100	100

1. Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Tingkat keberhasilan suatu bidang atau sekretariat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dinyatakan dalam persentase.
Formulasi	: $(\text{Nilai kinerja yang dicapai} / \text{target kinerja yang ditetapkan}) \times 100\%$
Sumber data	: Laporan Kinerja
Penanggung jawab	: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

2. Jumlah Inovasi

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Jumlah atau banyaknya upaya baru atau penyempurnaan yang digagas oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam berbagai bidang (pelayanan publik, tatakelola, pembangunan) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas hasil kerja. Kemudian diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan/Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.
Formulasi	: Dihitung secara manual dengan menjumlahkan

Sumber data	: semua inovasi yang terdata dan terverifikasi.
Penanggung jawab	: Seluruh Bidang lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
	: 1) Sekretariat;
	2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
	3) Bidang Perbendaharaan Daerah;
	4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
	5) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
	6) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
	7) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Kenaikan skor atau nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) suatu perangkat daerah dari periode sebelumnya. AKIP mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan.
Formulasi	: $\frac{\text{Nilai AKIP Periode saat ini} - \text{Nilai AKIP periode sebelumnya}}{\text{Nilai AKIP periode sebelumnya}} \times 100\%$
Sumber data	: Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Sekretariat

4. Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Proporsi belanja pegawai (selain tunjangan guru) yang dibayarkan melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) terhadap total belanja pegawai di luar tunjangan guru, dinyatakan dalam persentase.
Formulasi	: $\frac{\text{Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dibayarkan melalui TKD}}{\text{Total Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru}} \times 100\%$
Sumber data	: APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Anggaran

5. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Bagian dari total anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

Formulasi : $(\text{Total Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik} / \text{Total Anggaran Belanja Daerah}) \times 100\%$
 Sumber data : APBD Kabupaten Pesisir Selatan
 Penanggung jawab : Bidang Anggaran

6. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan Perbandingan antara belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dengan total belanja daerah, dinyatakan dalam persentase.
 Formulasi :
$$\frac{\text{Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

 Sumber data : APBD Kabupaten Pesisir Selatan
 Penanggung jawab : Bidang Anggaran

7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan Perbandingan antara belanja untuk urusan pemerintahan umum (setelah dikurangi belanja transfer) dengan total belanja daerah, dinyatakan dalam persentase. Belanja transfer adalah dana yang dialokasikan ke daerah lain atau entitas lain.
 Formulasi :
$$((\text{Belanja Urusan Pemerintahan Umum} - \text{Belanja Transfer}) / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

 Sumber data : APBD Kabupaten Pesisir Selatan
 Penanggung jawab : Bidang Anggaran

8. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan Tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, dinyatakan dalam persentase.
 Formulasi :
$$(\text{Total Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar} / \text{Total Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}) \times 100\%$$

 Sumber data : LRA Konsolidasi Kabupaten Pesisir Selatan
 Penanggung jawab : Bidang Perbendaharaan

9. Persentase Penurunan SILPA (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan Tingkat penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase. SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

Formulasi	: satu periode anggaran. : $((\text{SILPA Tahun Lalu} - \text{SILPA Tahun Sekarang}) / \text{SILPA Tahun Lalu}) \times 100\%$
Sumber data	: LRA Konsolidasi Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Perbendaharaan Daerah

10. Persentase Kepemilikan NPWP (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Proporsi penduduk atau wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap total penduduk atau wajib pajak yang memenuhi syarat, dinyatakan dalam persentase.
Formulasi	: $(\text{Jumlah Penduduk/Wajib Pajak yang Memiliki NPWP} / \text{Total Penduduk/Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat}) \times 100\%$
Sumber data	: Kantor Pajak
Penanggung jawab	: Bidang Perbendaharaan Daerah

11. Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Perbandingan antara anggaran sisa (anggaran yang tidak terpakai) dengan total belanja dalam APBD pada tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase.
Formulasi	: $(\text{Nilai Realisasi SILPA} / \text{Total Belanja APBD Tahun Sebelumnya}) \times 100\%$
Sumber data	: LRA Konsolidasi Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Perbendaharaan

12. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Proporsi laporan keuangan yang disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dinyatakan dalam persentase.
Formulasi	: $(\text{Jumlah Laporan Keuangan yang Disajikan Tepat Waktu} / \text{Total Laporan Keuangan yang Harus Disajikan}) \times 100\%$
Sumber data	: Laporan Keuangan PD
Penanggung jawab	: Bidang Akuntansi

13. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Merupakan Selisih antara realisasi belanja dengan total belanja yang dianggarkan dalam APBD, dinyatakan dalam persentase. Deviasi menunjukkan seberapa jauh realisasi belanja menyimpang dari anggaran yang telah ditetapkan.

Formulasi	:	$((\text{Realisasi Belanja} - \text{Belanja Total dalam APBD}) / \text{Belanja Total dalam APBD}) \times 100\%$
Sumber data	:	APBD Pertanggungjawaban Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

14. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)

<u>Level dalam Renstra</u>	:	<u>Kinerja Taktikal</u>
<u>Definisi Operasional</u>	:	Merupakan Selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD yang dianggarkan dalam APBD, dinyatakan dalam persentase. Deviasi menunjukkan seberapa jauh realisasi PAD menyimpang dari target yang telah ditetapkan.
Formulasi	:	$((\text{Realisasi PAD} - \text{Anggaran PAD dalam APBD}) / \text{Anggaran PAD dalam APBD}) \times 100\%$
Sumber data	:	APBD Pertanggungjawaban Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

15. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)

<u>Level dalam Renstra</u>	:	<u>Kinerja Taktikal</u>
<u>Definisi Operasional</u>	:	Merupakan Tingkat peningkatan nilai aset tetap (seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin) dari periode sebelumnya, dinyatakan dalam persentase.
Formulasi	:	$((\text{Nilai Aset Tetap Tahun Sekarang} - \text{Nilai Aset Tetap Tahun Lalu}) / \text{Nilai Aset Tetap Tahun Lalu}) \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan BMD
Penanggung jawab	:	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

16. Assets Management (%)

<u>Level dalam Renstra</u>	:	<u>Kinerja Taktikal</u>
<u>Definisi Operasional</u>	:	Merupakan Efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau pemerintah daerah, diukur berdasarkan indikator-indikator seperti pemanfaatan aset, pemeliharaan aset, dan pengamanan aset.
Formulasi	:	1. Apakah ada daftar asset tetap? (ya/tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? (ya/tidak) 4. Apakah Nilai Asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)
Sumber data	:	Laporan
Penanggung jawab	:	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

17. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan Persentase unit kerja atau entitas yang menjadi target pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan standar atau prosedur yang ditetapkan dalam suatu periode waktu tertentu. Pembinaan dan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pendapatan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Formulasi : $\text{Cakupan Pembinaan dan Pengawasan} = (\text{Jumlah Unit Kerja/Entitas yang Dibina dan Diawasi} / \text{Total Unit Kerja/Entitas yang Seharusnya Dibina dan Diawasi}) \times 100\%$
- Sumber data : Laporan dari Bidang P2EPD
- Penanggung jawab : bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

18. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan Tingkat adopsi dan implementasi sistem informasi keuangan berbasis digital di suatu organisasi atau entitas. Ini mencerminkan sejauh mana teknologi digital telah diintegrasikan ke dalam proses pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan, pelaporan, analisis, dan pengambilan keputusan keuangan.
- Formulasi : $\text{Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Digital} = (\text{Jumlah Unit/Proses yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Digital} / \text{Total Unit/Proses Keuangan yang Seharusnya Menerapkan}) \times 100\%$
- Sumber data : Laporan dari Bidang P2EPD
- Penanggung jawab : bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

19. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, dinyatakan dalam persentase. PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
- Formulasi : $(\text{Total PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$
- Sumber data : Laporan PAD/APBD
- Penanggung jawab : bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah

20. Rasio PAD (%)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan Perbandingan antara PAD dengan Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas). Indikator ini mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri melalui PAD.
Formulasi	:	$(\text{Total PAD} / \text{Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas}) \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan/APBD
Penanggung jawab	:	bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

IV. Penjelasan Indikator Kinerja Operasional
Pejabat Eselon IV

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Keuangan dan Pelaporani BPKPAD	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program dan kegiatan	88	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya Kualitas Layanan umum perangkat daerah	Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan penganggaran daerah	Persentase kesesuaian RKPD, KUA PPAS dengan APBD (%)	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran	4	4	4	4	4	4
		Penetapan dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Perencanaan & penganggaran	40	40	40	40	40	40
5	Meningkatnya kualitas Penatausahaan belanja daerah	Jumlah Penatausahaan belanja perangkat daerah sesuai dengan Aturan	40	40	40	40	40	40
		Persentase Perangkat Daerah yang tertib pengelolaan data dan administrasi keuangan daerah berbasis IT	100	100	100	100	100	100
		Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	100	100	100	100	100

6	Meningkatnya Kualitas SDM penatausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan	170	170	170	170	170	170
7	Meningkatnya kualitas pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Kriteria (%)	100	100	100	100	100	100
		Penyampaian laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100
		Kesesuaian Regulasi pengelolaan Keuangan yang disusun dengan peraturan yang berlaku (%)	100	100	100	100	100	100
8	Peningkatan Kualitas SDM Penyusun Laporan keuangan OPD	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Keuangan	150	150	150	150	150	150
9	Meningkatnya Pengelolaan BMD yang baik	Persentase Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang baik (%)	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun sesuai ketentuan	40	40	40	40	40	40
10	Optimalisasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang telah di amankan secara hukum dan administrasi (%)	35	35	40	40	40	40
11	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Kesesuaian target dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah (%)	100	100	100	100	100	100
		Kesesuaian regulasi pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun dengan peraturan yang berlaku (%)	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pertumbuhan PAD	18,89	2,13	2,5	2,75	3	3,25
12	Meningkatnya retribusi daerah	Rasio Retribusi daerah Terhadap PAD	57,11	57,25	57,50	57,75	58	58,25
13	Meningkatnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100
14	Meningkatnya Pajak Daerah	Rasio pajak daerah Terhadap PAD	31,88	33,58	35,33	37,08	38,83	40,58
		Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Perpajakan	5	10	10	15	15	15
15	Meningkatnya Kualitas Data Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah yang Telah Dimutakhirkan	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18

1. Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan proporsi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang seharusnya ada dan tersedia secara fisik atau

digital di Perangkat Daerah. Dokumen-dokumen ini mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dokumen anggaran (DPA, DPPA), Laporan Kinerja (LKjIP), dan dokumen evaluasi lainnya.

- Formulasi : (Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersedia pada tahun berjalan/ Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya ada) x 100%
- Sumber data : Laporan /Dokumen Perencanaan PD
- Penanggung jawab : Sekretariat

2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan tingkat keberhasilan penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah. Ini menunjukkan seberapa efektif Perangkat Daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

- Formulasi : $(\text{Total Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan} / \text{Total Anggaran Program dan Kegiatan}) \times 100\%$
- Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran PD
- Penanggung jawab : Sekretariat

3. Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan proporsi dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang seharusnya ada dan tersedia secara fisik atau digital di Perangkat Daerah.

- Formulasi : $(\text{Jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersedia} / \text{Jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang seharusnya ada}) \times 100\%$

- Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran PD
- Penanggung jawab : Sekretariat

4. Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan proporsi Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang lengkap dan tersedia di Perangkat Daerah dibandingkan dengan yang seharusnya ada

Formulasi : (Jumlah Laporan Administrasi BMD yang tersedia / Jumlah Laporan Administrasi BMD yang seharusnya ada) x 100%

Sumber data : Laporan dari Sekretariat

Penanggung jawab : Sekretariat

5. Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan proporsi laporan terkait administrasi kepegawaian yang lengkap dan tersedia di Perangkat Daerah. Ini mencakup data pegawai, absensi, penilaian kinerja, dan lain-lain.

Formulasi : (Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang tersedia / Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang seharusnya ada) x 100%

Sumber data : Laporan dari Sekretariat

Penanggung jawab : Sekretariat

6. Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan proporsi laporan terkait kegiatan administrasi umum (surat-menyurat, kearsipan, pengelolaan aset kantor, dll.) yang lengkap dan tersedia di Perangkat Daerah.

Formulasi : (Jumlah Laporan Administrasi Umum yang tersedia / Jumlah Laporan Administrasi Umum yang seharusnya ada) x 100%

Sumber data : Laporan dari Sekretariat

Penanggung jawab : Sekretariat

7. Persentase barang milik daerah yang tersedia

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan proporsi barang milik daerah yang tercatat dan secara fisik tersedia atau dapat ditemukan.

Formulasi : (Jumlah barang milik daerah yang tersedia / Jumlah barang milik daerah yang seharusnya tersedia berdasarkan catatan) x 100%

Sumber data : Laporan BMD Perangkat Daerah dari Sekretariat

Penanggung jawab : Sekretariat

8. Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan tingkat terpenuhinya kebutuhan

	jasa penunjang (listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, dll.) untuk mendukung operasional Perangkat Daerah.
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah jasa penunjang yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan jasa penunjang}} \times 100\%$
Sumber data	: Laporan dari Sekretariat
Penanggung jawab	: Sekretariat

9. Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Merupakan proporsi barang milik daerah yang kondisinya baik dan terpelihara sesuai standar yang ditetapkan.
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik}}{\text{Total jumlah barang milik daerah}} \times 100\%$
Sumber data	: Laporan BMD Perangkat Daerah dari Sekretariat
Penanggung jawab	: Sekretariat

10. Persentase kesesuaian RKPD, KUA PPAS dengan APBD

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Merupakan Perbandingan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang isinya selaras, konsisten dan sesuai dengan prinsip penyusunan anggaran, dibandingkan dengan seluruh dokumen yang disusun, dinyatakan dalam persen.
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah dokumen RKPD, KUA, PPAS yang sesuai}}{\text{Total dokumen RKPD, KUA, PPAS yang disusun}} \times 100\%$
Sumber data	: 1. Dokumen RKPD, KUA, PPAS yang telah disusun dan diverifikasi 2. Laporan hasil verifikasi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
Penanggung jawab	: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bapperida), Kepala Bidang Anggaran (BPKPAD)

11. Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Merupakan Banyaknya naskah atau dokumen resmi yang berisi kebijakan, pedoman, ketentuan, dan kerangka dasar penyusunan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran

daerah yang disusun dalam satu periode anggaran.

- Formulasi : $f(x) = \sum$ jumlah dokumen yang dihasilkan (satuan: dokumen)
- Sumber data : dokumen kebijakan anggaran yang telah ditetapkan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Anggaran

12. Penetapan dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan dokumen penganggaran (APBD, Perubahan APBD, atau dokumen turunannya) yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang diatur peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan seluruh dokumen penganggaran yang wajib ditetapkan, dinyatakan dalam persen.
- Formulasi : Penetapan dokumen penganggaran sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang diatur peraturan perundang-undangan
- Sumber data : a. Berita acara, surat keputusan, atau dokumen penetapan yang memuat tanggal pengesahan
b. Laporan pelaksanaan jadwal penyusunan anggaran
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Anggaran

13. Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan perencanaan dan penganggaran

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan Banyaknya pegawai, pejabat, atau pihak terkait yang berpartisipasi dan mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, rapat koordinasi, atau forum penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam satu tahun anggaran.
- Formulasi : jumlah peserta yang hadir dan tercatat dalam daftar hadir (satuan: orang)
- Sumber data : Daftar hadir peserta kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/rapat Dokumen administrasi kegiatan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Anggaran

14. Jumlah penatausahaan belanja perangkat daerah dengan aturan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan Banyaknya satuan kerja/perangkat daerah yang dalam pelaksanaan penatausahaan belanja (pencatatan, pembukuan, dan

		pelaporan belanja daerah) yang telah memenuhi ketentuan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibandingkan dengan seluruh perangkat daerah yang ada, dinyatakan dalam jumlah atau persen.
Formulasi	:	jumlah perangkat daerah yang penatausahaan belanjanya sesuai aturan
Sumber data	:	Laporan hasil pemeriksaan/verifikasi penatausahaan keuangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perbendaharaan

15. Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan data dan administrasi keuangan daerah berbasis IT

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Persentase OPD/SKPD yang telah menerapkan sistem informasi keuangan terintegrasi, data lengkap, akurat, konsisten, dan sesuai ketentuan akuntansi pemerintah
Formulasi	:	$(\text{Jumlah OPD tertib IT} / \text{Total seluruh OPD}) \times 100\%$
Sumber data	:	BPKPAD, Laporan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perbendaharaan

16. Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Persentase transaksi kas yang dicocokkan antara catatan pembukuan pemerintah daerah dengan catatan bank, Bendahara, dan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian nilai, waktu, dan objek transaksi
Formulasi	:	$(\text{Jumlah transaksi kas yang direkonsiliasi} / \text{Total transaksi kas periode berjalan}) \times 100\%$
Sumber data	:	Bendahara Umum Daerah (BUD), Laporan Rekonsiliasi Bank, Buku Kas Umum
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perbendaharaan

17. Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatusahaan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Jumlah pegawai pengelola keuangan/bendahara yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, atau pelatihan tentang tata cara pencatatan, pembukuan, dan penatausahaan keuangan daerah sesuai SAP
Formulasi	:	Jumlah peserta yang hadir dan terdaftar dalam kegiatan pembinaan

Sumber data : Daftar hadir, laporan kegiatan,
Penanggung jawab : Kepala Bidang Perbendaharaan

18. Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai kriteria

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Persentase laporan keuangan OPD yang disusun lengkap, sistematis, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Formulasi : $(\text{Jumlah laporan keuangan yang memenuhi kriteria} / \text{Total laporan yang diserahkan}) \times 100\%$
Sumber data : hasil verifikasi, laporan pemeriksaan internal, temuan BPK
Penanggung jawab : Kepala Bidang Akuntansi

19. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Persentase LKPD dan laporan keuangan OPD yang diserahkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Permendagri dan ketentuan penyampaian ke BPK/Kemendagri
Formulasi : $(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} / \text{Total laporan yang wajib disampaikan}) \times 100\%$
Sumber data : Bukti penyerahan, tanda terima, laporan keuangan yang disampaikan ke BPK/kemendagri
Penanggung jawab : Kepala Bidang Akuntansi

20. Kesesuaian Regulasi Pengelolaan Keuangan yang Disusun (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Persentase regulasi yang disusun (peraturan daerah/perkada/perbup) di bidang keuangan yang selaras dengan UU, PP, Permendagri, dan peraturan pusat lainnya
Formulasi : $(\text{Jumlah regulasi sesuai aturan pusat} / \text{Total regulasi keuangan yang disusun}) \times 100\%$
Sumber data : JDIH Daerah, Bagian Hukum, hasil evaluasi regulasi, laporan harmonisasi
Penanggung jawab : Kepala Bidang Akuntansi

21. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Keuangan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan Jumlah SDM pengelola keuangan yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi,

	atau pelatihan tentang penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah
Formulasi	: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan
Sumber data	: Daftar hadir pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab	: Kepala Bidang Akuntansi

22. Persentase Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang Baik (%)

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Merupakan Persentase OPD yang mengelola aset daerah sesuai aturan berlaku (lengkap pencatatannya, dipelihara, dan tidak ada penyimpangan signifikan)
Formulasi	: $\frac{\text{(Jumlah OPD dengan pengelolaan BMD baik / Total OPD pengelola BMD)} \times 100\%}{}$
Sumber data	: laporan inventarisasi, hasil verifikasi/pemeriksaan
Penanggung jawab	: Kepala Bidang Barang Milik Daerah

23. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Merupakan Jumlah laporan inventarisasi, mutasi, dan kondisi BMD yang disusun lengkap, benar, tepat waktu sesuai standar /ketentuan aset daerah
Formulasi	: Jumlah laporan BMD yang diverifikasi dan dinyatakan sesuai ketentuan
Sumber data	: laporan inventaris, dokumen administrasi BMD
Penanggung jawab	: Kepala Bidang Barang Milik Daerah

24. Persentase barang milik daerah yang telah di amankan secara hukum dan administrasi

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Merupakan Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki bukti kepemilikan sah secara hukum , tercatat lengkap dan akurat dalam pembukuan/inventarisasi resmi, serta didukung dokumen administrasi perolehan, pencatatan, dan penguasaan sesuai ketentuan.
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah BMD yang lengkap dokumen hukum \& administrasi}}{\text{Total BMD yang tercatat}} \times 100\%$
Sumber data	: Laporan Inventarisasi dan Rekonsiliasi BMD
Penanggung jawab	: Kepala Bidang Barang Milik Daerah

25. Persentase kesesuaian target dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan Tingkat ketercapaian penerimaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan
- Formulasi :
$$\frac{(\text{Realisasi Pajak} + \text{Retribusi})}{(\text{Target Pajak} + \text{Retribusi})} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan Realisasi APBD
- Penanggung jawab : Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

26. Kesesuaian regulasi pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun dengan peraturan yang berlaku

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan Tingkat keselarasan, kepatuhan, dan konsistensi seluruh peraturan daerah, kebijakan teknis, serta pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU, PP, Permendagri, Perda, dll) dalam siklus perencanaan, penetapan, pemungutan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- Formulasi :
$$(\text{Jumlah regulasi sesuai aturan pusat} / \text{Total regulasi pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun}) \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

27. Persentase Pertumbuhan PAD

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan Perkembangan kenaikan/ Penurunan jumlah Penerimaan Asli Daerah tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya
- Formulasi :
$$[(\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD Tahun } n-1) / \text{Realisasi PAD Tahun } n-1] \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan Realisasi
- Penanggung jawab : Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah

28. Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional	:	Merupakan Perbandingan antara jumlah penerimaan retribusi daerah dengan total PAD, menunjukkan kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli
Formulasi	:	$(\text{Realisasi Retribusi Daerah} / \text{Realisasi Total PAD}) \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Realisasi APBD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah

29. Persentase OPD yang Menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Persentase OPD yang menggunakan sistem transaksi non-tunai, pembayaran elektronik, dan layanan daring sesuai arahan Kemendagri
Formulasi	:	$(\text{Jumlah OPD menerapkan e-transaksi} / \text{Total OPD}) \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

30. Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan total PAD, menunjukkan kontribusi pajak sebagai sumber pendapatan utama
Formulasi	:	$(\text{Realisasi Pajak Daerah} / \text{Realisasi Total PAD}) \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Realisasi APBD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah

31. Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Perpajakan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Jumlah pegawai di bidang pendapatan yang memiliki sertifikasi, pelatihan khusus, atau keahlian terbukti dalam pengelolaan perpajakan daerah
Formulasi	:	Jumlah SDM yang memiliki bukti kompetensi/sertifikat perpajakan

- Sumber data : Daftar kepegawaian yang mengikuti pelatihan dibuktikan dengan dokumen pelatihan/sertifikasi
- Penanggung jawab : Kepala Bidang perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

32. Persentase Data Wajib Pajak & Objek Pajak Daerah yang Dimutakhirkan

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Merupakan Persentase data wajib pajak dan objek pajak yang diperbarui, diperbaiki, dan dilengkapi agar sesuai kondisi nyata di lapangan
- Formulasi : $(\text{Jumlah data WP-OP diperbarui} / \text{Total data WP-OP terdaftar}) \times 100\%$
- Sumber data : Basis data perpajakan, hasil pendataan ulang, sistem informasi perpajakan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



SUHANDRI, SE., MM
NIP. 19700608 200212 1 003